



I N T E G R A
G R O U P

**Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Yang Tidak Diaudit
Tanggal 31 Maret 2021**

**PT Integra Indocabinet Tbk
dan Entitas Anaknya**

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

**Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit
Tanggal 31 Maret 2021
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)**

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit

Tanggal 31 Maret 2021

dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	1
Laporan Laba Rugi Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	3
Laporan Arus Kas Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	4
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	5 - 54

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 MARET 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2021 DAN 2020
PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama | : Halim Rusli |
| Alamat Kantor | : Desa Betto RT 013, RW 007
Betto, Sedati
Sidoarjo |
| Alamat Domisili | : Jl. Margorejo Indah B-825
Kec. Wonocolo-Surabaya |
| Nomor Telepon | : (62-31) 8911209 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Wang Sutrisno |
| Alamat Kantor | : Desa Betto RT 013, RW 007
Betto, Sedati
Sidoarjo |
| Alamat Domisili | : Jl. Kertajaya Indah Timur 17/56
Kec. Sukolilo-Surabaya |
| Nomor Telepon | : (62-31) 8911209 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Integra Indocabinet Tbk dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 20 April 2021
Atas nama dan mewakili Direksi

 Halim Rusli Direktur Utama	 Wang Sutrisno Direktur
---	--

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK
DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2021
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	31 Maret 2021		31 Desember 2020
	Tidak diaudit	Catatan/Notes	Diaudit
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	30,339,066,295	2f, 2g, 2s, 4, 24	42,104,786,227
Piutang usaha			
Pihak ketiga, bersih	602,511,019,577	2f, 2s, 5, 24	685,120,289,992
Pihak berelasi	2,414,657,084	2e, 22	2,300,558,312
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	46,348,278,066	2f, 6, 24	30,877,062,397
Pihak berelasi	1,804,375,073	2e, 6, 24	1,537,999,457
Persediaan	2,424,622,848,462	2h, 7	2,112,619,684,285
Pajak dibayar di muka	81,743,658,380	2p, 15	63,208,513,482
Biaya dibayar di muka	5,639,711,521	2i	6,357,154,887
Uang muka pembelian	303,360,995,153	8	448,835,809,536
Jumlah Aset Lancar	3,498,784,609,611		3,392,961,858,575
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka pembelian	26,448,519,981	8	25,177,438,871
Aset pajak tangguhan	26,282,961,890	2p	26,282,961,890
Biological assets	1,654,124,763	2j, 10	1,654,124,763
Taksiran tagihan pajak	21,288,860,065	2p	32,814,654,370
Investasi	25,300,252,081	2f, 9	25,300,252,081
Aset tetap - bersih	2,312,927,994,919	2k, 2m, 2n, 11	2,334,405,644,303
Aset Hak Guna Usaha	122,205,998,575	2o, 11	105,529,341,206
Aset lain-lain - bersih	4,970,711,367	2l, 2n, 12	4,880,510,451
Jumlah Aset Tidak Lancar	2,541,079,423,641		2,556,044,927,935
JUMLAH ASET	6,039,864,033,252		5,949,006,786,510

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK AUDIT
(Lanjutan)
Tanggal 31 Maret 2021
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	31 Maret 2021 Tidak diaudit	Catatan/Notes	31 Desember 2020 Diaudit
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	2,027,966,022,774	2f, 2s, 13, 24	2,008,470,771,523
Utang usaha		2f, 2s, 14, 24	
Pihak ketiga	201,652,506,112	24	202,894,712,451
Pihak berelasi	-	2e, 22	6,061,310,841
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	12,576,711,456	2f	9,905,605,627
Pihak berelasi	-	2e, 22	2,950,000,007
Beban akrual	19,451,358,883	2f	17,384,506,252
Utang pajak	112,875,144,241	2p, 15	92,649,262,202
Uang muka pelanggan	1,820,216,613	2e, 16	19,049,182,618
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	148,587,194,570	2f, 13	161,998,655,062
Utang sewa pembiayaan	33,242,372,402	2f, 2o	29,156,185,369
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2,558,171,527,051		2,550,520,191,952

LIABILITAS
JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :			
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	65,355,023,652	2f, 13	93,328,200,670
Utang sewa pembiayaan	42,738,806,860	2f, 2o	30,761,130,770
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	143,852,000,000	2e, 2f, 22	149,615,000,000
Liabilitas pajak tangguhan	40,376,738,794	2p	40,376,738,794
Liabilitas imbalan kerja	55,806,328,986	2q	52,206,159,367

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian *Interim* yang tidak diaudit terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian *Interim* yang tidak diaudit ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT (Lanjutan)**

Tanggal 31 Maret 2021

dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	31 Maret 2021	Catatan/Notes	31 Desember 2020
	Tidak diaudit		Diaudit
Laba ditaguhkan atas Transaksi penjualan Dan penyewaan kembali	1,878,330,908	2o	2,361,983,268
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	350,007,229,200		368,649,212,869
JUMLAH LIABILITAS	2,908,178,756,251		2,919,169,404,821
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada periode 31 Maret 2021 dan Tahun 2020	630,625,000,000	2, 17a	630,625,000,000
Tambahan modal disetor	223,992,113,415	2d, 2v, 17b, 17c	223,992,113,415
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	141,425,224,187		141,425,224,187
Selisih transaksi nilai ekuitas dengan pihak non-pengendali	6,223,118,463		6,223,118,463
Penghasilan Komprehensif lain	896,015,500,169	2f, 9	896,015,500,169
Saldo laba	1,223,026,730,580		1,121,195,729,806
Sub-jumlah	3,121,307,686,814		3,019,476,686,040
Kepentingan non-pengendali	10,377,590,187	2c, 18	10,360,695,649
JUMLAH EKUITAS	3,131,685,277,001		3,029,837,381,689
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6,039,864,033,252		5,949,006,786,510

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2021
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	31 Maret 2021 Tidak diaudit	Catatan/Notes	31 Maret 2020 Tidak diaudit
PENJUALAN BERSIH	912,059,959,195	2e, 2r, 19, 22	482,137,457,059
BEBAN POKOK PENJUALAN	(610,998,202,384)	2r, 11, 20	(313,328,020,982)
LABA BRUTO	301,061,756,811		168,809,436,077
Beban Penjualan	(70,592,918,714)	2r, 11, 21	(23,468,667,579)
Beban umum dan administrasi	(41,576,581,979)	2e, 2r, 11, 21, 22	(33,874,929,816)
Jumlah Beban Operasional	(112,169,500,693)		(57,343,597,395)
Pendapatan Operasional	188,892,256,118		111,465,838,682
Pendapatan (Beban) Lain - Lain			
Beban bunga	(53,056,190,441)	2e, 2o, 2r	(50,153,756,624)
Beban administrasi bank	(1,896,273,562)	2r	(637,618,347)
Penghasilan bunga	61,120,091	2r	51,585,058
Lain - lain bersih	(7,136,772,453)	2r	3,564,007,039
Laba (rugi) pelepasan aset tetap	1,252,281,361	2k	(240,160,040)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	7,088,475,788	2s	13,622,319,865
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain - Lain	(53,687,359,216)		(33,793,623,049)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	135,204,896,902		77,672,215,633
MANFAAT (BEBAN) PAJAK			
Kini	(33,357,001,590)	2p, 15	(20,540,228,963)
Tangguhan	-		-
Jumlah beban pajak - bersih	(33,357,001,590)		(20,540,228,963)
LABA TAHUN BERJALAN	101,847,895,312		57,131,986,670
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Kenaikan nilai wajar dari aset keuangan	-		-
Peningkatan revaluasi aset tetap - bersih	-		-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - bersih	-		-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	101,847,895,312		57,131,986,670
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	64.60	2u, 23	36.24

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN *INTERIM*
TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2021
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

Catatan/ Notes	Modal saham	Tambahan Modal Disetor	STPEA	Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	Cadangan Pengukuran Imbalan Kerja	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Selisih Translasi	RE	Total	NCI	Total Eq.
Saldo Awal - 1 Januari 2021	630,625,000,000	223,992,113,415	6,223,118,463	-	-	896,015,500,169	141,425,224,187	1,121,195,729,806	3,019,476,686,040	10,360,695,649	3,029,837,381,689
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	101,831,000,774	101,831,000,774	16,894,538	101,847,895,312
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Maret 2021	630,625,000,000	223,992,113,415	6,223,118,463	-	-	896,015,500,169	141,425,224,187	1,223,026,730,580	3,121,307,686,814	10,377,590,187	3,131,685,277,001

Catatan/ Notes	Modal saham	Tambahan Modal Disetor	STPEA	Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	Cadangan Pengukuran Imbalan Kerja	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Selisih Translasi	RE	Total	NCI	Total Eq.
Saldo Awal - 1 Januari 2020	630,625,000,000	226,788,468,642	6,223,118,463	-	7,780,828,630	894,740,879,393	141,425,224,187	786,041,366,868	2,693,624,886,183	9,983,501,899	2,703,608,388,082
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	57,031,107,428	57,031,107,428	100,879,242	57,131,986,670
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Maret 2020	630,625,000,000	226,788,468,642	6,223,118,463	-	7,780,828,630	894,740,879,393	141,425,224,187	843,072,474,296	2,750,655,993,611	10,084,381,141	2,760,740,374,752

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2021
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

**Untuk periode tiga bulan yang berakhir
Pada tanggal 31 Maret 2021**

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Maret 2020 (Tidak diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1,006,353,722,822	666,074,872,592
Pembayaran kas kepada pemasok, direksi, karyawan dan beban operasional lain-lain	(917,602,388,139)	(529,217,433,365)
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	88,751,334,683	136,857,439,227
Penghasilan keuangan	61,120,091	-
Beban keuangan	(57,631,584,530)	(50,791,374,971)
Pembayaran pajak	(17,441,593,885)	(32,398,655,421)
Penerimaan pajak	11,525,794,305	-
Lain-lain - bersih	(3,114,272,453)	3,564,007,039
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	22,150,798,211	57,231,415,874
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(11,749,638,725)	(28,236,977,375)
Perolehan aset lain-lain	(233,000,000)	4,318,080
Pembayaran Uang Muka Pembelian Asset Tetap	(3,043,718,140)	2,041,408,710
Hasil Penjualan aset tetap	24,469,656,115	(209,090,909)
Penambahan investasi	-	(330,400,000)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	9,443,299,250	(26,730,741,494)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan utang bank jangka pendek	1,710,598,251,416	1,357,387,804,283
Pembayaran utang bank jangka pendek	(1,741,760,620,074)	(1,375,684,784,453)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(41,773,313,998)	6,730,203,965
Penambahan utang bank jangka panjang	388,676,487	(6,402,321,264)
Pembayaran utang sewa	(7,999,391,747)	-
Penambahan utang sewa	23,761,858,012	-
Perolehan (pembayaran) utang lain-lain	(5,763,000,000)	(42,572,856,487)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(62,547,539,904)	(60,541,953,956)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2021
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Maret 2020 (Tidak diaudit)
KENAIKAN (PENURUNAN)		
BERSIH KAS, SETARA		
KAS DAN CERUKAN	(30,953,442,443)	(30,041,279,576)
DAMPAK BERSIH		
PERUBAHAN NILAI		
TUKAR ATAS KAS		
DAN SETARA KAS	1,274,514,921	-
KAS, SETARA KAS DAN		
CERUKAN AWAL TAHUN	1,064,892,094	(10,502,984,820)
KAS, SETARA KAS DAN		
CERUKAN AKHIR TAHUN	(28,614,035,428)	(40,544,264,396)
Kas, setara kas dan cerukan terdiri dari:		
Kas dan setara kas	30,339,066,295	29,727,725,392
Cerukan	(58,953,101,723)	(70,271,989,788)
JUMLAH	(28,614,035,428)	(40,544,264,396)

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Integra Indocabinet, Tbk ("Perusahaan" atau "ITG") didirikan berdasarkan akta notaris Soetjipto, S.H., No. 147 tanggal 19 Mei 1989. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-320.HT.01.01.th'90 tanggal 20 Januari 1990.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris Susanti, S.H., M.Kn., No. 1 tanggal 17 Juni 2019 mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0033818.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 1 Juli 2019.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Perusahaan berkedudukan di Sidoarjo dan saat ini bergerak dalam bidang produksi mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya. Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasinya pada tahun 1989.

PT Integra Indo Lestari (IIL) adalah entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-307/D.04/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pernyataan Pendaftaran Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum Perdana telah dinyatakan efektif. Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan mencatatkan 1.250.000.000 lembar sahamnya dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 100 per saham di Bursa Efek Indonesia.

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal **31 Maret 2021** adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hendro Rusli
Komisaris	:	Stephanie Kane Ilham
Komisaris Independen	:	Bing Hartono Poernomosidi
	:	Heri Sunaryadi

Direksi

Direktur Utama	:	Halim Rusli
Wakil Direktur Utama	:	Meity Linlin
Direktur	:	Widjaja Karli
	:	Syany Tjandra
Direktur Independen	:	Wang Sutrisno

Perusahaan dan Entitas Anaknya (bersama-sama disebut "Kelompok Usaha") memiliki 2.157 dan 2.065 orang karyawan tetap masing-masing pada tanggal **31 Maret 2021** (tidak diaudit) dan 31 Desember 2020.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2021
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perusahaan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Aktivitas Bisnis	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan	Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)		
				31 Maret 2021			
				31 Mar, 2021	31 Des, 2020	31 Mar, 2021	31 Des, 2020
Entitas Anak Langsung							
PT Narkata Rimba (NKT)	Kalimantan Timur/ <i>East Kalimantan</i>	a	1978	99.00%	99.00%	137,392	143,771
PT Belayan River Timber (BRT)	Kalimantan Timur / <i>East Kalimantan</i>	a	1972	99.32%	99.32%	337,873	338,902
PT Intertrend Utama (ITR)	Sidoarjo	b	1993	99.79%	99.79%	1,644,947	1,585,640
PT Interkraft (ITK)	Sidoarjo	b	2002	99.53%	99.53%	948,863	940,277
PT Intera Indonesia (INT)	Sidoarjo	b	2012	99.89%	99.89%	916,095	898,979
PT Integriya Dekorindo (ITD)	Sidoarjo	c	2013	99.88%	99.88%	221,000	222,709
PT Inter Kayu Mandiri (IKM)	Sidoarjo	d	2015	80.00%	80.00%	16,560	16,598
Entitas Anak Tidak Langsung							
Melalui PT Intertrend Utama (ITR)							
PT Superalam Mas (SAM)	Tulungagung	e	2006	100.00%	100.00%	4,077	4,072

Aktivitas Bisnis Entitas Anak / *Subsidiaries's Business Activity*

- a. Industri Hak Pengelolaan Hutan/ *Forest Concession Right Industry*
- b. Industri Mebel/ *Furniture Industry*
- c. Perdagangan dan Jasa/ *Services and Trading*
- d. Perusahaan Induk/ *Holding Company*
- e. Perkebunan/ *Plantation*

PT Belayan River Timber

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 32 tanggal 27 Desember 2019, para pemegang saham BRT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 67,907 miliar menjadi Rp 99,307 miliar yang disetor seluruhnya oleh Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006928.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020.

PT Intertrend Utama

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 28 tanggal 27 Desember 2019, para pemegang saham ITR menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 280,006 miliar menjadi Rp 429,706 miliar yang disetor seluruhnya oleh Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006909.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020.

PT Interkraft

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 31 tanggal 27 Desember 2019, para pemegang saham ITK menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 213 miliar menjadi Rp 250,3 miliar yang disetor seluruhnya oleh Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006923.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020.

PT Intera Indonesia

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 34 tanggal 27 Agustus 2019, para pemegang saham INT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 78 miliar menjadi Rp 150 miliar yang disetor seluruhnya oleh Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0060990.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak (Lanjutan)

PT Intera Indonesia (Lanjutan)

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 29 tanggal 27 Desember 2019, para pemegang saham INT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 150 miliar menjadi Rp 210 miliar yang disetor seluruhnya oleh Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006911.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020.

PT Integriya Dekorindo

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 37 tanggal 27 Agustus 2019, para pemegang saham ITD menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 100,2 miliar menjadi Rp 108,2 miliar yang disetor seluruhnya oleh Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0068439.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 12 September 2019.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 30 tanggal 27 Desember 2019, para pemegang saham ITD menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 108,2 miliar menjadi Rp 164,7 miliar yang disetor seluruhnya oleh Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006913.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020.

PT Superalam Mas

Berdasarkan akta notaris Julia Seloadji, S.H., No. 23 tanggal 16 November 2020, para pemegang saham SAM menyetujui pengalihan saham SAM milik Muhchin Karli, Hendro Rusli dan William Kurniawan Rusli kepada INT, sehingga INT memiliki 200 lembar saham dengan nominal Rp 500.000 per saham. Persentase kepemilikan INT adalah sebesar 40%.

Berdasarkan akta notaris Julia Seloadji, S.H., No. 29 tanggal 19 November 2020, para pemegang saham SAM menyetujui pengalihan saham SAM milik Hendro Rusli dan Widjaja Karli kepada ITR, sehingga ITR memiliki 185 lembar saham dengan nominal Rp 500.000 per saham. Persentase kepemilikan ITR adalah sebesar 37%.

Berdasarkan akta notaris Julia Seloadji, S.H., No. 40 tanggal 25 November 2020, para pemegang saham SAM menyetujui pengalihan saham SAM milik Halim Rusli kepada ITR, sehingga ITR memiliki 300 lembar saham dengan nominal Rp 500.000 per saham. Persentase kepemilikan ITR menjadi sebesar 60%.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn No. 15 tanggal 28 Desember 2020, para pemegang saham SAM menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 250.000.000 menjadi Rp 6.750.000.000 yang disetor oleh ITR dan INT masing-masing sebesar Rp 3.900.000.000 dan Rp 2.600.000.000. Persentase kepemilikan ITR dan INT masing-masing sebesar 60% dan 40%.

Transaksi akuisisi SAM tersebut merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali. Sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012) yang mensyaratkan unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah perusahaan tersebut telah bergabung sejak awal terjadi sepengendalian, maka laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018/1 Januari 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari transaksi kombinasi entitas sepengendali sebesar Rp 4.383.054.475 dibukukan sebagai bagian dari akun "Tambahan modal disetor" sebagai salah satu komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Transaksi akuisisi SAM tersebut merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali. Sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012) yang mensyaratkan unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah perusahaan tersebut telah bergabung sejak awal terjadi sepengendalian, maka laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018/1 Januari 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari transaksi kombinasi entitas sepengendali sebesar Rp 4.383.054.475 dibukukan sebagai bagian dari akun "Tambahan modal disetor" sebagai salah satu komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

1. UMUM (Lanjutan)**d. Entitas Anak (Lanjutan)****PT Superalam Mas (Lanjutan)**

Ringkasan informasi keuangan SAM adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jumlah aset lancar	72,257,197	50,891,900	50,016,500
Jumlah aset tidak lancar	3,999,417,443	3,454,571,670	3,111,332,010
Jumlah aset	4,071,674,640	3,505,463,570	3,161,348,510
Jumlah liabilitas jangka pendek	95,341,471	6,165,260,778	6,164,754,031
Jumlah liabilitas	95,341,471	6,165,260,778	6,164,754,031
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	113,441,981	343,608,313	331,932,257

e. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 20 April 2021

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas mencakup kas, bank dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang setelah dikurangi cerukan dan tidak dijamin.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Kelompok Usaha.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Kelompok Usaha telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

Penerapan atas PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Penerapan atas PSAK No. 71 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Penerapan atas PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* antara *International Accounting Standards Board* (IASB) dan *Financial Accounting Standards Board* (FASB), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisa sebelum mengakui pendapatan.

Penerapan atas PSAK No. 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Penerapan atas PSAK No. 73 "Sewa"

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 73 "Sewa" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi Kelompok Usaha tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Dalam menerapkan PSAK No. 73 untuk pertama kalinya, Kelompok Usaha menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;
- menggunakan tinjauan ke belakang ("*hindsight*") dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa; dan
- mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa diukur berdasarkan nilai kini yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit (jika suku bunga tersebut dapat ditentukan) atau menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Kelompok Usaha jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

ISAK No. 36 "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK No.16: Aset Tetap dan PSAK No. 73: Sewa".

ISAK No. 25 "Hak atas tanah", dicabut dengan diterbitkannya PSAK No. 73 "Sewa" dan tidak akan efektif lagi sejak 1 Januari 2020. Interpretasi atas standar tersebut mengharuskan manajemen untuk melakukan penilaian apakah substansi suatu transaksi adalah merupakan transaksi pembelian aset atau sewa. ISAK No. 36 memberikan panduan lebih lanjut tentang bagaimana membedakan sewa dari pembelian atau penjualan ketika hak milik atas aset pendasar tidak dialihkan kepada *lessee*/pembeli dan menekankan akuntansi untuk hak atas tanah tergantung pada substansi hak dan bukan hukumnya.

Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020 aset hak-guna Kelompok Usaha meningkat sebesar Rp 97.911.765.460 yang terdiri dari pengakuan liabilitas sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 10.852.309.631, reklasifikasi dari aset yang sebelumnya telah diakui sebagai aset sewa pembiayaan sebesar Rp 87.300.221.359 dan dampak terhadap saldo awal laba ditahan sebesar Rp 240.765.530.

Penerapan dari amandemen di bawah ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:

- a) Amandemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020;
- b) Amandemen PSAK No. 1 dan PSAK No. 25: Definisi Material, berlaku efektif 1 Januari 2020.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anaknya.

Pengendalian didapat ketika Kelompok Usaha terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara khusus, Kelompok Usaha mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Kelompok Usaha memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Kelompok Usaha dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara yang lain;
- hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara dan hak potensial Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Kelompok Usaha menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Kelompok Usaha dan pada kepentingan non-pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit.

Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Kelompok Usaha akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Seluruh akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Kelompok Usaha sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan entitas anak disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi;
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Kelompok Usaha akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laba atau rugi dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

d. Akuntansi Penggabungan Usaha

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 38 (2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali dan diterapkan untuk kombinasi bisnis sepengendali yang memenuhi persyaratan dalam PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis", baik untuk entitas penerima ataupun entitas yang melepas bisnis.

Akuisisi atau pengalihan saham antara entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK No. 38 (2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Dalam PSAK No. 38 (2012), pengalihan aset, kewajiban, saham dan instrumen kepemilikan lainnya dari entitas sepengendali tidak menghasilkan laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual dalam kelompok yang sama.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang dialihkan harus dicatat sebesar nilai buku sebagai penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Selisih antara nilai tercatat investasi pada tanggal efektif dan harga pengalihan diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha mengungkapkan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian.

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Kelompok Usaha jika mereka:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Kelompok Usaha;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha; atau
- (iii) merupakan personil manajemen kunci Kelompok Usaha atau entitas induk dari Perusahaan.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Kelompok Usaha jika:

- (a) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, Kelompok Usaha; (ii) memiliki kepentingan dalam Kelompok Usaha yang memberikan pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Kelompok Usaha;
- (b) suatu pihak adalah entitas asosiasi Kelompok Usaha;
- (c) suatu pihak adalah ventura bersama di mana Kelompok Usaha sebagai *venturer*;

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

- (d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Kelompok Usaha;
- (e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- (f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau di mana hak suara signifikan dimiliki oleh, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau
- (g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Kelompok Usaha atau entitas yang terkait dengan Kelompok Usaha.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

f. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Kelompok Usaha mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Kelompok Usaha terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan penyertaan saham diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Kelompok Usaha tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Kelompok Usaha menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Kelompok Usaha dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Kelompok Usaha menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang di mana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas saldo SPPI. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

Penilaian model bisnis

Kelompok Usaha menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Kelompok Usaha mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

g. Penilaian model bisnis (Lanjutan)

Model bisnis Kelompok Usaha tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);

Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Kelompok Usaha.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "*worst case*" atau "*stress case*". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Kelompok Usaha tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui sebagai "Pendapatan keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Sebelum 1 Januari 2020, Kelompok Usaha mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Kelompok Usaha untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau

dalam hal Kelompok Usaha mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dilaporkan sebagai "Pendapatan keuangan".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "Kerugian penurunan nilai".

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE")

SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK No. 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE"). Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*).

Sebelum 1 Januari 2020, bukti objektif penurunan nilai aset keuangan termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau

hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Kelompok Usaha atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang.

Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha terdiri dari utang bank dan lembaga keuangan bukan bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Kelompok Usaha tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban keuangan" dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan *fee* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SBE.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hirarki Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mentransfer suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual suatu aset atau mentransfer liabilitas terjadi. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Kelompok Usaha harus memiliki akses ke pasar utama.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan di mana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas di mana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada tingkat hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan *input* terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Hirarki Nilai Wajar (Lanjutan)

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis;
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi di mana seluruh *input* yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi di mana seluruh *input* yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terjadi transfer antara Tingkat di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Kelompok Usaha telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan tingkat hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank serta deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang pada saat ditempatkan dan yang tidak dijadikan sebagai jaminan dan dibatasi dalam penggunaannya.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.

Biaya perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata yang meliputi harga pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lainnya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut, serta membawanya ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Barang jadi dan barang dalam proses meliputi alokasi beban produksi tetap dan variabel, sebagai tambahan atas bahan baku dan tenaga kerja langsung.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penyisihan atas persediaan usang atau penurunan nilai persediaan, jika ada, ditetapkan berdasarkan penelaahan kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan.

i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Biologis

Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada akhir periode berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual kecuali ketika nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal. Kelompok Usaha mengukur Hutan Tanaman Industri (HTI) pada nilai perolehan karena manajemen yakin parameter yang digunakan pada pengukuran nilai wajar tidak dapat diandalkan.

Aset biologis merupakan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan pengembangan HTI dalam daur pertama, kecuali beban umum dan administrasi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut, dikapitalisasi dan ditangguhkan pembebanannya sampai saat HTI yang bersangkutan menghasilkan/siap ditebang, serta disajikan pada akun "Aset biologis" di laporan keuangan konsolidasian.

Kelompok Usaha mencatat aset biologis pada harga perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian Kelompok Usaha dalam melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI.

k. Aset Tetap

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Revaluasi akan dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Aset Tetap (Lanjutan)

Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, maka revaluasi secara tahunan perlu dilakukan. Revaluasi secara tahunan tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan, sehingga revaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali dianggap cukup.

Surplus revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Defisit revaluasi diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tersebut diakui dalam surplus revaluasi aset tetap sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Surplus/defisit revaluasi aset tetap yang dipindahkan secara berkala setiap periode ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus/defisit revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga pembelian, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset (jika ada). Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan terhadap jumlah biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah.

Pada saat pembaharuan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi berjalan.

Penyusutan dimulai saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	10-25
Sarana dan prasarana	10
Instalasi listrik	8-20
Mesin dan peralatan	4-16
Alat-alat berat	8
Kendaraan dan inventaris	4-8

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah oleh manajemen, dan jika perlu disesuaikan secara prospektif. Perubahan dalam umur masa manfaat aset yang diharapkan dan nilai sisa menjadi pertimbangan untuk modifikasi periode depresiasi dan jumlah terdepresiasi yang diperlukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB"), dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset tetap" dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan perpanjangan atau pembaharuan hak-hak tersebut di atas diakui sebagai aset yang ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur manfaat ekonomis tanah, periode mana yang lebih pendek.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam tahun/periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

l. Biaya Ditangguhkan atas Hak Pengusahaan Hutan

Biaya/iuran yang terjadi untuk memperoleh "Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)", seperti biaya Hak Pengusahaan Hutan ("HPH"), analisis mengenai dampak lingkungan, foto udara dan rencana karya pengusahaan hutan, ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa manfaat masing-masing IUPHHK tersebut dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu IUPHHK.

m. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung pada perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya pinjaman dapat meliputi beban bunga, beban keuangan dalam sewa dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga yang ditanggung Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

Beban bunga yang dikapitalisasi dihitung menggunakan biaya pinjaman rata-rata tertimbang Kelompok Usaha setelah penyesuaian pinjaman yang terkait dengan pembangunan spesifik. Ketika pinjaman telah dikaitkan dengan pembangunan spesifik, beban bunga yang dikapitalisasi adalah sebesar beban bunga kotor yang terjadi dikurangi dengan pendapatan atas investasi sementara yang dilakukan.

Beban bunga dikapitalisasi dari awal pekerjaan pembangunan sampai dengan tanggal penyelesaian, ketika pekerjaan pembangunan telah selesai secara substansial.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset tersebut dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan sementara jika aktivitas pembangunan terganggu untuk waktu yang berkelanjutan. Beban bunga juga dikapitalisasi ke dalam biaya perolehan dari properti yang diperoleh secara spesifik untuk pembangunan, tetapi hanya atas aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan properti sedang dalam penyelesaian.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset non-keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut untuk menentukan kerugian penurunan nilai (jika ada). Jika tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan secara individual, Kelompok Usaha akan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas aset ("UPK").

Estimasi jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai dari aset atau UPK tersebut. Ketika jumlah terpulihkan suatu aset non-keuangan ("UPK") di bawah nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset ("UPK") diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya dan kerugian penurunan nilai yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

o. Sewa

Sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian adalah, atau mengandung, sewa didasarkan pada substansi pengaturan pada saat dimulainya masa sewa. Pengaturannya adalah, atau mengandung, sewa jika pemenuhan pengaturan tergantung pada penggunaan aset atau aset tertentu dan pengaturan tersebut menyatakan hak untuk menggunakan aset atau aset, walaupun aset tersebut tidak secara eksplisit ditentukan dalam suatu pengaturan.

Sebagai Lessee

Sewa diklasifikasikan pada tanggal permulaan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Suatu sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

o. Sewa (Lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Sebagai Lessee (Lanjutan)

Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada saat dimulainya masa sewa guna usaha pada nilai wajar properti sewa yang disewa atau, jika nilai yang lebih rendah, pada nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan pengurangan liabilitas sewa dan bagian yang merupakan beban sewa sehingga terjadi tingkat bunga yang konstan atas sisa saldo liabilitas. Beban keuangan diakui sebagai beban keuangan dalam laba rugi.

Aset sewaan disusutkan selama masa manfaat aset. Namun, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Kelompok Usaha akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset tersebut akan disusutkan selama jangka waktu taksiran masa manfaat aset dan masa sewa yang mana yang lebih pendek.

Sewa operasi adalah sewa selain sewa pembiayaan. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laba rugi dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Sebagai Lessor

Sewa di mana Kelompok Usaha tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk melakukan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

Sesudah 1 Januari 2020

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 73 "Sewa", yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi". Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamandemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal inisiasi suatu kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasi, Kelompok Usaha menilai apakah:

- a) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b) Kelompok Usaha memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c) Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Kelompok Usaha memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Kelompok Usaha mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Kelompok Usaha mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, di mana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

o. Sewa (Lanjutan)

Sesudah 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Sewa jangka-pendek dan sewa aset bernilai- rendah

Kelompok Usaha menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi pembelian). Kelompok Usaha juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset pendasar bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Transaksi jual dan sewa-balik sebelum tanggal penerapan awal

Jika transaksi jual dan sewa-balik dicatat sebagai penjualan dan sewa pembiayaan sesuai PSAK No. 30: Sewa, maka penjual-penyewa:

- mencatat sewa-balik dengan cara yang sama seperti mencatat sewa pembiayaan lainnya yang terjadi pada tanggal penerapan awal; dan
- lanjut mengamortisasi setiap keuntungan penjualan selama masa sewa.

p. Perpajakan

Pajak Kini

Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini yang berasal dari periode berjalan dan periode sebelumnya dicatat sebesar jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan dari atau dibayarkan kepada Kantor Pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil Kelompok Usaha sehubungan dengan situasi di mana interpretasi diperlukan untuk peraturan perpajakan yang terkait dan menetapkan provisi jika diperlukan.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai pendapatan atau beban dalam operasi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan direviu pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Pajak tangguhan yang terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Pos pajak tangguhan diakui terkait dengan transaksi yang mendasarinya baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

Pajak Final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2013 tanggal 12 Juni 2013, peredaran kotor kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak merupakan subjek dari pajak penghasilan final yaitu sebesar 1% dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan di atas tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan. PP ini dirubah dengan PP No 23/2018 tanggal 8 Juni 2018 mengenai perubahan penghasilan final menjadi sebesar 0,5%

Atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak penghasilan diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") kecuali:

- i) PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- ii) piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

q. Imbalan Kerja

Kelompok Usaha mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UUK") dan PSAK No. 24 (2016), "Imbalan Kerja". Berdasarkan UUK tersebut, Kelompok Usaha diharuskan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada karyawan apabila persyaratan yang ditentukan dalam UUK tersebut terpenuhi.

Beban pensiun Kelompok Usaha ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kelompok Usaha mengevaluasi kesepakatan pendapatannya terhadap kriteria spesifik untuk menentukan apakah Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal atau agen. Kelompok Usaha menyimpulkan bahwa Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal pada semua kesepakatan pendapatannya. Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan barang dan jasa

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Kelompok Usaha diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya. Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan.

Pendapatan sewa

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sesudah 1 Januari 2020

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Kelompok Usaha mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Kelompok Usaha mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut: (Lanjutan)

- Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;
- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Untuk penjualan barang, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

Kelompok Usaha mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu hanya jika entitas dapat mengukur kemajuan secara wajar terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Dalam beberapa keadaan, Kelompok Usaha mungkin tidak dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Kelompok Usaha memperkirakan untuk memulihkan biaya yang terjadi dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan.

Dalam keadaan tersebut, Kelompok Usaha mengakui pendapatan hanya sejumlah biaya yang terjadi sampai waktu tertentu di mana Kelompok Usaha dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**Sesudah 1 Januari 2020 (Lanjutan)****Pendapatan/Beban Bunga**

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama umur yang diharapkan dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, terhadap nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

s. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode/tahun yang bersangkutan. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

Mata uang	31 Maret 2021	31 Desember 2020
US\$ 1	14,572	14,105
EUR 1	17,065	17,330
RMB 1	2,220	2,161

Transaksi dalam mata uang asing lainnya (jika ada) dianggap tidak signifikan.

t. Informasi Segmen

Segmen adalah komponen dari Kelompok Usaha yang dapat dibedakan yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat didistribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

u. Laba per Saham Dasar

Jumlah laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun/periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun/periode yang bersangkutan.

Apabila jumlah saham biasa yang beredar meningkat tanpa disertai peningkatan sumber daya, maka jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan dengan perubahan proporsional atas jumlah saham beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari periode sajian paling awal.

v. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya emisi yang terjadi sehubungan dengan penerbitan saham Perusahaan dikurangkan langsung dari "Tambahan Modal Disetor" yang diperoleh dari penawaran efek tersebut.

w. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

w. Provisi (Lanjutan)

Seluruh provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

x. Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi sangat kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila ada kemungkinan pemasukan manfaat ekonomi.

y. Peristiwa setelah Periode Laporan Keuangan

Peristiwa setelah akhir periode laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Kelompok Usaha pada periode laporan keuangan (*adjusting events*) diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode laporan keuangan yang bukan merupakan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban pokok penjualan serta beban langsung terkait Kelompok Usaha.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan berdasarkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi.

Rugi Penurunan Nilai Piutang

Kelompok Usaha menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) piutang usaha dan piutang lain-lain. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Kelompok Usaha menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Kelompok Usaha dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

a. Pertimbangan (Lanjutan)

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya.

Revaluasi Tanah dan Bangunan

Kelompok Usaha mengukur tanah dan bangunan pada jumlah revaluasi dengan perubahan pada nilai wajar diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain ("OCI"). Kelompok Usaha melibatkan penilai independen dalam menentukan nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2018. Nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan berdasarkan bukti pasar dengan menggunakan harga yang dapat dibandingkan dan disesuaikan terhadap faktor-faktor pasar spesifik seperti sifat, lokasi dan kondisi aset tersebut.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan untuk menentukan nilai wajar tanah dan bangunan diungkapkan pada Catatan 11

Sewa

Sewa operasi

Sebelum 1 Januari 2020, Kelompok Usaha mempunyai perjanjian-perjanjian sewa di mana Kelompok Usaha bertindak sebagai *lessee* untuk sewa kantor, gudang dan toko. Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK No. 30, "Sewa", yang mensyaratkan Kelompok Usaha untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamandemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal permulaan kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Ketika nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tidak dapat diperoleh dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Imbalan Kerja (Lanjutan)

asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Namun tidak terdapat kepastian bahwa Kelompok Usaha dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau keseluruhan dari aset pajak tangguhan tersebut.

Ketidakpastian Liabilitas Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh, atau negosiasi dengan, otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Kelompok Usaha membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Taksiran Nilai Realisasi Neto Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan.

Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)**b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)****Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan (Lanjutan)**

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas masa depan yang diproyeksikan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji.

Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
KAS	1,139,195,968	981,909,559
BANK		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	9,405,984,282	3,713,328,011
PT Bank Central Asia Tbk	10,818,353,578	4,799,611,911
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	289,162,073	232,163,294
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	173,462,835	7,986,262,720
PT Bank ICBC	62,214,425	19,888,511
PT Bank Mega Tbk	2,123,680	1,006,027
Bank Maspion	73,700,001	-
PT Bank KEB Hana Indonesia	17,032,834	984,746
PT Bank Jatim, Tbk	-	17,110,887
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	96,337,886	126,696,887
<u>Dollar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	4,376,170,071	7,026,378,486
PT Bank Central Asia Tbk	3,212,257,363	7,517,884,022
PT UOB Buana Indonesia	4,553,167	4,491,032
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	428,598,367	386,627,778
PT Bank ICBC	119,070,872	184,060,583
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	105,614,067	91,386,328
<u>Ren Min Bi</u>		
PT Bank ICBC	15,234,826	14,995,445
SETARA KAS - DEPOSITO BERJANGKA		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	-	9,000,000,000
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	30,339,066,295	42,104,786,227

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (Lanjutan)

Deposito berjangka memperoleh tingkat bunga sebesar 2.85% untuk periode 31 Desember 2020.

Tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan dan dibatasi penggunaannya.

5. PIUTANG USAHA – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Interkreasi Kerta Aji	2,118,185,455	2,118,185,455
PT Alam Mentari Sejahtera	296,471,629	235,920,280
Sub Jumlah	2,414,657,084	2,354,105,735
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(53,547,423)
Pihak berelasi - bersih	2,414,657,084	2,300,558,312
 Ekspor	268,819,974,694	339,448,594,547
Lokal	335,395,552,129	347,399,195,236
Sub Jumlah	604,215,526,823	686,847,789,783
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,704,507,246)	(1,727,499,791)
Pihak ketiga - bersih	602,511,019,577	685,120,289,992
Jumlah - Bersih	604,925,676,661	687,420,848,304

b. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
Rupiah	336,473,887,630	348,340,439,421
Dollar Amerika Serikat	268,451,789,031	339,080,408,883
Sub Jumlah	604,925,676,661	687,420,848,304

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

5. PIUTANG USAHA – BERSIH (Lanjutan)

c. Berdasarkan umur

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
1 - 30 hari	530,263,080,201	633,286,591,737
31 - 60 hari	8,750,424,364	3,971,493,547
61 – 90 hari	1,087,978,241	8,832,369,462
> 90 hari	64,824,193,855	41,330,393,558
Sub Jumlah	604,925,676,661	687,420,848,304

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain terdiri dari:

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Interkreasi Kerta Aji	1,803,375,073	1,536,999,457
PT Alam Mentari Sejahtera	1,000,000	1,000,000
Sub Jumlah	1,804,375,073	1,537,999,457
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Tawotu	27,417,604,824	28,039,377,160
Simphoni	281,783,269	337,783,269
Karyawan	296,176,828	421,589,492
Lain-lain	18,352,713,145	2,078,312,476
Sub Jumlah	46,348,278,066	30,877,062,397
Jumlah	48,152,653,139	32,415,061,854

Pada tahun 2018, BRT, entitas anak, mengadakan perjanjian pinjaman untuk keperluan operasional kepada PT. Strata Pasific dan PT Tawotu.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai piutang.

7. PERSEDIAAN – BERSIH

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
<u>Manufaktur</u>		
Bahan baku dan pembantu	1,265,183,903,557	1,086,915,167,177
Barang dalam proses	521,267,024,003	463,904,635,358
Barang jadi	447,921,397,682	363,838,656,991
Barang dalam perjalanan	1,863,038,498	-

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

7. PERSEDIAAN – BERSIH (Lanjutan)

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
<u>Kehutanan</u>		
Bahan baku dan pembantu	140,801,231,944	146,375,728,516
Sparepart	2,232,610,796	4,787,784,014
<u>Perdagangan</u>		
Barang dagangan	45,467,375,791	47,107,791,553
Sub-Jumlah	2,424,736,582,271	2,112,929,763,609
Cadangan Penurunan Nilai	(113,733,809)	(310,079,324)
Jumlah	2,424,622,848,462	2,112,619,684,285

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada persediaan usang, oleh karena itu tidak dibentuk penyisihan atas persediaan usang.

8. UANG MUKA PEMBELIAN

Akun ini terdiri dari uang muka pembelian atas:

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Aset tetap	26,448,519,981	24,337,667,000
Persediaan	254,947,037,984	424,426,891,324
Lain-lain	48,413,957,169	25,248,690,083
Jumlah	329,809,515,134	474,013,248,407
Disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:		
Aset lancar	303,360,995,153	449,675,581,407
Aset tidak lancar	26,448,519,981	24,337,667,000
Jumlah	329,809,515,134	474,013,248,407

Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, Kelompok Usaha memiliki uang muka pembelian aset tetap – tanah yang berlokasi di Lingkar Timur, Sidoarjo seluas ± 4.665 m² dengan nilai Rp 11.000.443.562.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

9. PENYERTAAN SAHAM

Penyertaan saham terdiri dari:

	Persentase kepemilikan	Biaya perolehan	Kenaikan atas perubahan nilai wajar	Nilai wajar
31 Maret 2021				
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Melalui PT Inter Kayu Mandiri				
PT WoodOne Integra Indonesia (WII)	25%	16,560,000,000	3,835,852,081	20,395,852,081
PT Teknologi Optimal Prima (TOP)	8.92%	3,004,400,000	-	3,004,400,000
PT Interkreasi Kerta Aji (IKA)	19%	1,900,000,000	-	1,900,000,000
Jumlah/Total		21,464,400,000	3,835,852,081	25,300,252,081

	Persentase kepemilikan	Biaya perolehan	Kenaikan atas perubahan nilai wajar	Nilai wajar
31 Desember 2020				
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Melalui PT Inter Kayu Mandiri				
PT WoodOne Integra Indonesia (WII)	25%	16,560,000,000	3,835,852,081	20,395,852,081
PT Teknologi Optimal Prima (TOP)	8.92%	3,004,400,000	-	3,004,400,000
PT Interkreasi Kerta Aji (IKA)	19%	1,900,000,000	-	1,900,000,000
Jumlah/Total		21,464,400,000	3,835,852,081	25,300,252,081

10. ASET BIOLOGIS

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
Saldo Awal	1,654,124,763	1,249,571,670
Penambahan	-	404,553,093
Saldo Akhir	1,654,124,763	1,654,124,763

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset biologis dapat dipulihkan seluruhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset biologis tersebut.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2021
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

11. ASET TETAP – BERSIH DAN ASET HAK-GUNA – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

Aset Tetap

31 Maret 2021

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai tercatat					
Pemilikan langsung					
Tanah	1,122,447,043,813	-	-	-	1,122,447,043,813
Bangunan	547,812,756,101	-	-	-	547,812,756,101
Sarana prasarana	70,561,234,844	6,213,286,227	-	-	76,774,521,071
Instalasi listrik	47,134,345,365	-	-	-	47,134,345,365
Mesin dan peralatan	360,866,664,046	5,285,260,099	19,451,874,556	7,401,072,358	354,101,121,947
Alat-alat berat	187,093,260,247	-	-	-	187,093,260,247
Kendaraan	92,776,074,748	2,124,437,000	2,810,011,057	269,500,000	92,360,000,691
Inventaris	31,574,958,494	518,457,280	27,683,867	-	32,065,731,907
Sub-jumlah	2,460,266,337,658	14,141,440,606	22,289,569,480	7,670,572,358	2,459,788,781,142
Aset dalam penyelesaian	381,431,961,784	5,914,301,256	4,708,248,500	(2,588,888,158)	380,049,126,382
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih	62,921,923,871	-	-	-	62,921,923,871
Jumlah	2,904,620,223,313	20,055,741,862	26,997,817,980	5,081,684,200	2,902,759,831,395
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	84,040,821,371	10,185,936,380	-	-	94,226,757,751
Sarana prasarana	42,485,610,292	1,555,728,803	-	-	44,041,339,095
Instalasi listrik	23,389,906,665	981,331,301	-	-	24,371,237,966
Mesin dan peralatan	143,586,780,141	4,967,756,189	2,904,995,340	751,902,120	146,401,443,110
Alat-alat berat	172,433,623,247	2,044,475,852	-	-	174,478,099,099
Kendaraan	64,414,956,213	1,954,899,164	1,420,241,414	84,218,760	65,033,832,723
Inventaris Kantor	24,825,141,974	652,671,836	6,192,325	-	25,471,621,485
Sub-jumlah	555,176,839,903	22,342,799,525	4,331,429,079	836,120,880	574,024,331,229
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih	15,037,739,107	769,766,140	-	-	15,807,505,247
Jumlah	570,214,579,010	23,112,565,665	4,331,429,079	836,120,880	589,831,836,476
Nilai Buku	2,334,405,644,303				2,312,927,994,919

31 Desember 2020

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai tercatat					
Pemilikan langsung					
Tanah	1,113,402,243,813	9,044,800,000	-	-	1,122,447,043,813
Bangunan	528,195,267,711	1,461,626,264	-	18,155,862,126	547,812,756,101
Sarana prasarana	70,561,234,844	-	-	-	70,561,234,844
Instalasi listrik	38,755,942,573	4,416,518,364	-	3,961,884,428	47,134,345,365
Mesin dan peralatan	309,452,896,893	66,874,797,327	31,746,408,529	16,285,378,355	360,866,664,046
Alat-alat berat	186,088,260,247	1,005,000,000	-	-	187,093,260,247

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2021
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

11. ASET TETAP – BERSIH DAN ASET HAK-GUNA – BERSIH (Lanjutan)
Aset Tetap (Lanjutan)

31 Desember 2020

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Kendaraan	88,893,790,181	11,277,170,309	8,876,735,742	1,481,850,000	92,776,074,748
Inventaris	29,312,155,116	2,125,869,100	85,903,012	222,837,290	31,574,958,494
Sub-jumlah	2,364,661,791,378	96,205,781,364	40,709,047,283	40,107,812,199	2,460,266,337,658
Aset dalam penyelesaian	340,364,002,349	83,444,503,799	34,689,500	(42,341,854,864)	381,431,961,784
Aset sewa pembiayaan	95,411,670,600	(95,411,670,600)	-	-	-
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih	60,632,888,870	54,992,336	-	2,234,042,665	62,921,923,871
Jumlah	2,861,070,353,197	84,293,606,899	40,743,736,783	-	2,904,620,223,313
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	44,034,883,567	40,005,937,804	-	-	84,040,821,371
Sarana prasarana	36,402,351,385	6,083,258,907	-	-	42,485,610,292
Instalasi listrik	21,672,607,827	3,866,142,022	-	(2,148,843,184)	23,389,906,665
Mesin dan peralatan	131,563,433,332	19,870,301,608	7,811,604,797	(35,350,002)	143,586,780,141
Alat-alat berat	163,271,402,087	9,162,221,160	-	-	172,433,623,247
Kendaraan	58,881,951,777	9,669,327,547	4,171,673,113	35,350,002	64,414,956,213
Inventaris	21,990,636,276	2,908,234,647	73,728,949	-	24,825,141,974
Sub-jumlah	477,817,266,251	91,565,423,695	12,057,006,859	(2,148,843,184)	555,176,839,903
Aset sewa pembiayaan	8,111,449,241	(8,111,449,241)	-	-	-
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih	9,841,248,374	3,047,647,549	-	2,148,843,184	15,037,739,107
Jumlah	495,769,963,866	86,501,622,003	12,057,006,859	-	570,214,579,010
Nilai Buku	2,365,300,389,331				2,334,405,644,303

Aset Hak Guna

	Tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklas	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	8,599,838,325	1,968,564,525	-	(269,500,000)	10,298,902,850
Alat-alat berat	2,610,000,000	-	-	-	2,610,000,000
Mesin dan peralatan	99,896,341,853	21,793,323,487	-	(4,812,184,200)	116,877,481,140
Sewa bangunan	10,611,544,101	-	-	-	10,611,544,101
Jumlah	121,717,724,279	23,761,888,012	-	(5,081,684,200)	140,397,928,091

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2021
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

11. ASET TETAP – BERSIH DAN ASET HAK-GUNA – BERSIH (Lanjutan)
Aset Hak Guna (Lanjutan)

	Tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklas	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan					
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	1.647.201.732	283.522.279	-	(84.218.760)	1.846.505.251
Alat-alat berat	919.791.667	81.562.500	-	-	1.001.354.167
Mesin dan peralatan	10.391.589.007	1.759.732.225	-	(751.902.120)	11.399.419.112
Sewa bangunan	3.229.800.667	714.850.319	-	-	3.944.650.986
Jumlah	16.188.383.073	2.839.667.323	-	(836.120.880)	18.191.929.516
Nilai Buku	105.529.341.206				122.205.998.575
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklas	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	12.265.017.273	2.212.151.052	-	(5.877.330.000)	8.599.838.325
Alat-alat berat	2.610.000.000	-	-	-	2.610.000.000
Mesin dan peralatan	80.536.653.327	22.529.584.718	-	(3.169.896.192)	99.896.341.853
Sewa bangunan	10.611.544.101	-	-	-	10.611.544.101
Jumlah	106.023.214.701	24.741.735.770	-	(9.047.226.192)	121.717.724.279
Akumulasi Penyusutan					
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	2.284.540.977	1.193.230.854	-	(1.830.570.099)	1.647.201.732
Alat-alat berat	593.541.667	326.250.000	-	-	919.791.667
Mesin dan peralatan	5.233.366.597	5.910.408.767	-	(752.186.357)	10.391.589.007
Sewa bangunan	-	3.229.800.667	-	-	3.229.800.667
Jumlah	8.111.449.241	10.659.690.288	-	(2.582.756.456)	16.188.383.073
Nilai Buku	97.911.765.460				105.529.341.206

Pada periode Maret 2021 dan 2020, penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari aset dalam penyelesaian masing-masing sebesar Rp 2,588,888,158 dan Rp 42.341.854.864.

Pada periode Maret 2021 dan 2020, penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari aset hak-guna dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp 5,081,684,200 dan Rp 9.047.226.192.

Pada tahun 2020, penambahan aset tetap dalam rangka bangun, kelola, dan alih termasuk reklasifikasi dari aset tetap dengan biaya perolehan sebesar Rp 2.234.042.665 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.128.761.006

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

11. ASET TETAP – BERSIH DAN ASET HAK-GUNA – BERSIH (Lanjutan)

Pembebanan penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
Beban Pokok Penjualan	19,455,230,929	78,737,205,430
Beban Administrasi dan Umum	1,937,139,585	8,107,022,287
Beban Penjualan	1,720,195,151	4,682,087,073
Jumlah	23,112,565,665	91,526,314,790

Nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan dengan menggunakan metode pendekatan pasar dan biaya. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah dan bangunan yang dinilai. Nilai wajar tanah dan bangunan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan dan KJPP Hari Utomo & Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK dalam laporannya masing-masing tanggal 16 November 2018 dan 28 Desember 2018.

Kelompok Usaha memiliki aset tetap tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 20-30 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2021, HGB Kelompok Usaha masih memiliki sisa jangka waktu 2-29 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HGB tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang saat jatuh tempo.

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

		31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	
	Perkiraan % Penyelesaian	Nilai Tercatat	Tahun Perkiraan penyelesaian
Tanah	85%	310,395,620,552	November 2021
Bangunan, Sarana dan Prasarana	60%	68,936,305,831	Januari 2022
Mesin dan Peralatan	70%	717,199,999	Juni 2021
Jumlah		380,049,126,382	

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

11. ASET TETAP – BERSIH DAN ASET HAK-GUNA – BERSIH (Lanjutan)

	31 Desember 2020 (Diaudit)		
	Perkiraan % Penyelesaian	Nilai Tercatat	Tahun Perkiraan penyelesaian
Tanah	82%	310,395,620,552	November 2021
Bangunan, Sarana dan Prasarana	53%	64,412,527,075	Januari 2022
Mesin dan Peralatan	57%	6,623,814,157	Juni 2021
Jumlah		381,431,961,784	

12. ASET LAIN-LAIN – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
Biaya pengelolaan hak pengusahaan hutan, bersih	4,348,451,758	4,490,490,002
Aset tetap - pengampunan pajak - bersih	-	-
Lain-lain	622,259,609	390,020,449
Jumlah	4,970,711,367	4,880,510,451

Kelompok Usaha memiliki hak pengelolaan hutan (“HPH”) dengan jangka waktu 43-53 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2021, HPH Kelompok Usaha masih memiliki sisa jangka waktu 30-33 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HPH tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang saat jatuh tempo.

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari:

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
<u>Perusahaan</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
Indonesia Eximbank		
Fasilitas kredit modal kerja ekspor I (Tranche A dan B) (US\$ 5.000.000 dan Rp 133.450.000.000)	206,310,000,000	203,975,025,000
Fasilitas kredit modal kerja ekspor II	345,700,000,000	345,700,000,000

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
Fasilitas kredit modal kerja ekspor III	66,725,000,000	66,725,000,000
Fasilitas kredit modal kerja ekspor VIII	97,227,123,520	100,000,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Revolving loan		14,629,580,035
The Hongkong and Shanghai Banking Corp, Ltd Loan against export Technical Documents Against Acceptance Revolving loan	102,500,000,000	116,000,000,000
PT Bank Jatim, Tbk KMK Keppres	-	-
PT Bank Central Asia Tbk KMK (kredit ekspor)	1,190,452,077	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Demand Loan	70,000,000,000	70,000,000,000
Omnibus trade finance	-	-
Cerukan	17,875,434,236	6,969,244,276
Sub-jumlah	907,528,009,833	935,998,849,311

Entitas AnakPihak ketiga

Indonesia Eximbank		
Fasilitas kredit modal kerja ekspor I	205,000,000,000	205,000,000,000
Fasilitas kredit modal kerja Tranche A dan B	173,695,345,455	175,000,000,000
Fasilitas kredit modal kerja ekspor II	42,700,000,000	42,700,000,000
Fasilitas kredit modal kerja ekspor IV	80,000,000,000	80,000,000,000
Fasilitas kredit modal Kerja Ekspor Transaksional	134,000,000,000	140,000,000,000
The Hongkong and Shanghai Banking Corp, Ltd Loan against export	63,000,000,000	67,500,000,001
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KMK-Revolving loan facility	-	3,542,848,522
PT Bank ICBC Indonesia Pre-export financing Non-LC (US\$ 1.250.000 dan US\$ 1.875.000 pada Maret 2021 dan Desember 2020)	18,215,000,000	19,394,381,875

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		
Omnibus trade finance	137,750,000,000	137,750,000,000
PT Bank Central Asia, Tbk		
Fasilitas Kredit Ekspor	30,000,000,000	30,000,000,000
Fasilitas Kredit Time Loan Revolving	15,000,000,000	15,000,000,000
Cerukan	13,949,947,534	13,604,203,076
Letter of credit	10,000,000,000	2,514,041,957
PT Bank Maspion		
Cerukan	27,127,719,952	20,466,446,781
Fixed Loan	65,000,000,000	60,000,000,000
Demand Loan	105,000,000,000	60,000,000,000
Sub-jumlah	1,120,438,012,941	1,072,471,922,212
Jumlah	2,027,966,022,774	2,008,470,771,523

PerusahaanLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Pada tanggal 6 November 2017, Perusahaan dan BRT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor II (KMKE II) dengan batas maksimum menjadi sebesar Rp 170 miliar. Pada tanggal 21 Desember 2018, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit KMKE II dengan batas maksimum menjadi sebesar Rp 430 miliar. Pada tanggal 22 Desember 2020, fasilitas kredit KMKE II mengalami perubahan nama menjadi fasilitas kredit KMKE I *Tranche C*.

Pada tahun 2018, Perusahaan merubah batas maksimum fasilitas kredit modal kerja ekspor I (KMKE I) *Tranche A* menjadi sebesar US\$ 5.000.000 dan *Tranche B* menjadi sebesar Rp 133,45 miliar.

Pada bulan Mei 2019, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja ekspor VIII (KMKE VIII) dengan batas maksimum sebesar Rp 100 miliar. Pada tanggal 22 Desember 2020, fasilitas kredit KMKE VIII mengalami perubahan nama menjadi fasilitas kredit KMKE III *Tranche C*.

Pada bulan September 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor III (KMKE III) dengan batas maksimum sebesar Rp 66,725 miliar. Pada tanggal 22 Desember 2020, fasilitas kredit KMKE III mengalami perubahan nama menjadi fasilitas kredit KMKE III *Tranche A*.

Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga sebesar 9,65% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 dan 6% dan 5,8%-6% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset tetap, piutang usaha dan persediaan tertentu milik Perusahaan.

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas *revolving loan* dan fasilitas ekspor (*loan against export* dan *technical documents against acceptance*) dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 12 miliar dan Rp 120 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 7,5% per tahun di bawah *best lending rate* masing-masing pada periode 2020, 2019 dan 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021 dan dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap tertentu milik Perusahaan. Perusahaan telah melunasi fasilitas *technical documents against acceptance* pada bulan Mei 2020.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

Pada tanggal 5 Agustus 2019, Perusahaan dan Entitas Anaknya, ITR, ITK, ITD (Kelompok Usaha), memperoleh fasilitas kredit berupa cerukan (hanya untuk Perusahaan), *demand loan* dan *omnibus trade finance* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 20 miliar, Rp 70 miliar dan US\$ 7,5 juta (tersedia dalam mata uang Rupiah dan US\$). Pada tanggal 26 Desember 2019, Kelompok Usaha memperoleh penambahan batas maksimum fasilitas *omnibus trade finance* menjadi US\$ 9,5 juta (tersedia dalam mata uang Rupiah dan US\$). Pada tanggal 28 Desember 2020, terjadi perubahan batas maksimum fasilitas *omnibus trade finance* menjadi Rp 137.750.000.000 (tersedia dalam mata uang Rupiah dan US\$).

Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 10% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dan 5,5% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2021 dan dijamin dengan aset tetap tertentu milik Kelompok Usaha. Berdasarkan perjanjian kredit, Kelompok Usaha diwajibkan untuk menjaga rasio *debt to equity* maksimum 3,5x. Perusahaan telah melunasi fasilitas *omnibus trade finance* pada bulan Juni 2020.

Beberapa perubahan berkaitan dengan fasilitas kredit PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

1. Fasilitas kredit berjangka dengan limit Rp 70 miliar ditutup
2. Perubahan atas fasilitas *omnibus trade finance* yang semula dengan limit sebesar Rp 137,750,000,000 menjadi sebesar Rp 116,450,000,000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 31 Juli 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas *revolving loan* dengan batas maksimum sebesar Rp 30 miliar yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 11% per tahun masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2021 dan dijamin dengan aset tetap tertentu milik Perusahaan dan *corporate guarantee* dari IIL.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Pada tanggal 12 Maret 2021, Perusahaan telah memperoleh persetujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit berupa fasilitas pinjaman rekening koran dan *demand loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 5 miliar dan Rp 25 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,5% per tahun pada tahun 2021 dengan jangka waktu selama 12 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan aset tetap tertentu milik perusahaan dan *corporate guarantee* dari Perusahaan.

Entitas anak

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Pada tanggal 14 Desember 2018, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor I (KMKE I) dengan batas maksimum sebesar Rp 205 miliar yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 10% per tahun masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu milik ITR dan *corporate guarantee* dari Perusahaan.

Pada tanggal 14 Desember 2018, ITK, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor (KMKE) *Tranche A* dan *B* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 97 miliar dan Rp 78 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,75% per tahun masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan, piutang usaha dan aset tetap tertentu milik ITK dan *corporate guarantee* dari Perusahaan.

Pada tanggal 7 September 2016, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor transaksional (KMKE Transaksional) dengan batas maksimum sebesar Rp 60 miliar. Pada tahun 2018, INT memperoleh peningkatan batas maksimum fasilitas menjadi Rp 140 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 10% per tahun masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2021. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap tertentu milik INT.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) (Lanjutan)

Sejak tahun 2013, BRT, entitas anak, memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja ekspor IV (KMKE IV) dengan batas maksimum sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dengan jangka waktu 1 tahun dan dibebani bunga 9,65% per tahun masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Pada tanggal 22 Desember 2020, fasilitas kredit KMKE IV mengalami perubahan nama menjadi fasilitas kredit KMKE III *Tranche B*.

Kelompok Usaha terikat dengan beberapa batasan, antara lain Kelompok Usaha harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk:

- Mengubah anggaran dasar atau mengubah status perusahaan.
- Melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham perusahaan lain.
- Melakukan *merger* atau akuisisi, kecuali menurut kebijakan pemerintah.
- Membagikan dividen saham atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan dalam jumlah berapapun juga kepada pemegang saham.
- Memelihara rasio keuangan yakni rasio *debt to equity* maksimal 3x.

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 18 Oktober 2018, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit *loan against export* dengan batas maksimum sebesar US\$ 5.000.000 (atau setara Rupiah). Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 7,5% per tahun di bawah *best lending rate* masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2021 dan dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap tertentu milik ITR.

Perusahaan dan ITR terikat dengan beberapa batasan, antara lain:

- Rasio lancar minimum 1x.
- Rasio *gearing* maksimum 1x.
- *Interest service coverage ratio* minimum 1,25x.
- Rasio pembiayaan maksimum 90%.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Pada tanggal 5 November 2020, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran, *fixed loan* dan *demand loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 15 miliar, Rp 30 miliar dan Rp 30 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,75% per tahun pada tahun 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 November 2021.

Pada tanggal 5 November 2020, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran, *fixed loan* dan *demand loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 15 miliar, Rp 30 miliar dan Rp 30 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,75% per tahun pada tahun 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 November 2021.

Pada tanggal 12 Maret 2021, ITR, entitas anak, memperoleh persetujuan untuk mendapatkan tambahan fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran dan *demand loan* dengan batas maksimum masing-masing menjadi Rp 25 miliar dan Rp 120 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,5% per tahun pada tahun 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2021.

Pada tanggal 12 Maret 2021, ITK, entitas anak, memperoleh persetujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran dan *fixed loan* dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 5 miliar dan Rp 5 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 9,5% per tahun pada tahun 2021 dengan jangka waktu selama 12 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan aset tetap tertentu milik ITR, INT dan ITK dan *corporate guarantee* dari Perusahaan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari: (Lanjutan)

Entitas anak (Lanjutan)PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 12 April 2019, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas rekening koran, *time loan revolving* dan kredit ekspor dengan batas maksimum masing-masing sebesar Rp 15 miliar, Rp 15 miliar dan Rp 30 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 10,5% per tahun untuk fasilitas rekening koran dan 10,25% per tahun untuk fasilitas lainnya pada tahun 2020 dan 2019. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2021 dan dijamin dengan persediaan dan aset tetap tertentu milik INT dan *corporate guarantee* dari Perusahaan.

Pada bulan Agustus 2020, ITR, entitas anak, memperoleh tambahan fasilitas *letter of credit usance* dengan batas maksimum sebesar US\$ 1.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2021.

PT Bank ICBC Indonesia

Pada tahun 2014, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit *pre-export financing non-LC* dengan batas maksimum sebesar US\$ 2.500.000. Pada tahun 2018, ITR memperoleh penurunan batas maksimum fasilitas menjadi US\$ 2.000.000. Pada tahun 2020, ITR memperoleh penurunan batas maksimum fasilitas menjadi US\$ 1.500.000. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 6,25% per tahun masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 September 2021. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan tertentu milik ITR dan jaminan pribadi dari Halim Rusli, Hendro Rusli dan Widjaja Karli.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 29 Agustus 2017, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit *revolving loan* dengan batas maksimum sebesar Rp 10 miliar yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 11%-11,5% dan 11% per tahun masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2021 dan dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu milik INT, *corporate guarantee* dari IIL dan *personal guarantee* dari Stephanie Kane Ilham.

Kelompok Usaha terikat dengan beberapa batasan antara lain, Kelompok Usaha harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk:

- Mengubah status hukum perusahaan dan mengubah anggaran dasar.
- Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari bank.
- Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.
- Melakukan *merger*, akuisisi atau reorganisasi atau investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
- Mengubah bidang usaha.
- Menarik kembali modal yang disetor.
- Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. Rasio lancar minimal 1x.
 - b. Rasio *debt to equity* maksimal 2,5x.
 - c. Rasio *debt service coverage* minimal 100%.
 - d. Rasio piutang dan persediaan terhadap jumlah fasilitas kredit modal kerja minimal 110%.

- b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari:

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
<u>Perusahaan</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
Indonesia Eximbank		
Fasilitas kredit		
investasi ekspor VII	101,000,000,000	122,000,000,000
PT BCA Finance	965,894,223	1,044,607,724

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari: (Lanjutan)

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		
Kredit angsuran berjangka	8,520,833,333	9,088,888,888
Sub-jumlah	110,486,727,556	132,133,496,612
<u>Entitas Anak</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
The Hongkong and Shanghai Banking Corp, Ltd		
Fasilitas kredit investasi Ekspor	19,687,500,000	22,500,000,000
Indonesia Eximbank		
Fasilitas kredit investasi ekspor	14,363,999,995	26,999,999,989
Fasilitas kredit Modal Kerja Ekspor II	-	-
PT Bank Central Asia, Tbk		
Fasilitas kredit investasi	24,708,333,330	26,708,333,330
PT BCA Finance	623,540,182	381,505,524
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		
Kredit angsuran berjangka	43,961,450,490	46,409,854,897
Lain-lain	110,666,669	193,665,380
Sub-jumlah	103,455,490,666	123,193,359,120
Jumlah	213,942,218,222	255,326,855,732
Bagian Jatuh Tempo dalam waktu satu tahun	(148,587,194,570)	(161,998,655,062)
Bagian Jangka Panjang	65,355,023,652	93,328,200,670

PerusahaanLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Pada bulan Mei 2019, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja ekspor VII (KMKE VII) dengan batas maksimum sebesar Rp 200 miliar yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan Januari 2022. Fasilitas pinjaman di atas dibebani bunga sebesar 9,65% per tahun masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Fasilitas pinjaman dijamin dengan aset tetap tertentu, piutang usaha, persediaan Perusahaan serta *personal guarantees* sebagian direksi Perusahaan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 5 Agustus 2019, Kelompok Usaha memperoleh fasilitas kredit berupa kredit angsuran berjangka dengan batas maksimum sebesar Rp 100 miliar. Pada tanggal 26 Desember 2019, Kelompok Usaha memperoleh penurunan batas maksimum fasilitas menjadi sebesar Rp 60 miliar. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan Desember 2025 dengan masa tenggang 6 bulan. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 10,25% per tahun masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 dan dijamin dengan aset tetap tertentu milik Kelompok Usaha.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (Lanjutan)

- b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari: (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

PT BCA Finance

Pada tahun 2016-2018, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan dengan PT BCA Finance yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan 2019-2021. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 4,18%-5,69% per tahun masing-masing pada tahun 2019 dan 2018.

Entitas Anak

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Pada tanggal 14 Desember 2018, ITK, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi ekspor (KIE) dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp 62 miliar. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan hingga 16 Juni 2021 dan dibebani bunga sebesar 10% per tahun masing-masing pada tahun 2019 dan 2018. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu milik ITK dan *corporate guarantee* dari Perusahaan.

Pada tanggal 18 September 2018, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi ekspor (KIE) dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp 11,2 miliar. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan 19 September 2021 dan dibebani bunga sebesar 9,75% per tahun masing-masing pada tahun 2019 dan 2018. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap tertentu milik INT.

Pada tanggal 14 Desember 2018, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja ekspor II (KMKE II) dari Exim dengan batas maksimum sebesar Rp 18 miliar. Fasilitas ini terutang dalam angsuran bulanan hingga 6 Maret 2020 dan dibebani bunga sebesar 10,2% per tahun masing-masing pada tahun 2019 dan 2018. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu ITR dan *corporate guarantee* dari Perusahaan. ITR telah melunasi fasilitas tersebut pada bulan Maret 2020.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 12 April 2019, INT, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit investasi dengan batas maksimum sebesar Rp 40 miliar. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 10,25% per tahun masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 dan terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan April 2024. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan aset tetap tertentu milik INT dan *corporate guarantee* dari Perusahaan.

Entitas anak terikat dengan beberapa batasan, antara lain:

- Rasio lancar minimum 1x.
- Rasio debt to equity maksimum 1x.
- Rasio debt service coverage minimum 1x.

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 18 Oktober 2018, ITR, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit berupa pinjaman dengan cicilan tetap dengan batas maksimum sebesar Rp 45 miliar yang terutang dalam angsuran bulanan sampai dengan Desember 2022. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 5% di bawah bunga pinjaman berjangka masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 dan dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap tertentu milik ITR dan *corporate guarantee* dari Perusahaan.

PT BCA Finance

Pada tahun 2015-2017, ITR, ITK dan INT, entitas anak, mengadakan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan dengan angsuran bulanan hingga tahun 2021. Fasilitas ini dibebani bunga sebesar 3,6%-7,79% per tahun masing-masing pada tahun 2020 dan 2019.

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2020, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan (*waiver*) sebagaimana diperlukan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

14. UTANG USAHA

- a. Akun ini terdiri dari utang kepada pemasok sebagai berikut:

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
<u>Pihak ketiga</u>		
Impor	9,456,482,026	17,336,408,719
Lokal	192,196,024,086	185,558,303,732
Jumlah	201,652,506,112	202,894,712,451

- b. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
Rupiah	192,196,024,086	185,558,303,732
Dollar Amerika Serikat	8,593,293,878	11,859,787,437
Euro	734,547,179	42,183,952
RMB	128,640,969	5,434,437,330
Sub Jumlah	201,652,506,112	202,894,712,451

14. UTANG USAHA (Lanjutan)

- c. Berdasarkan umur

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
1 - 30 hari	185,715,354,337	201,005,256,024
31 - 60 hari	7,113,039,143	873,800,603
61 – 90 hari	45,291,401	525,552
> 90 hari	8,778,821,231	1,015,130,272
Sub Jumlah	201,652,506,112	202,894,712,451

Utang usaha merupakan utang tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

15. PERPAJAKAN

- a. Pajak dibayar dimuka:

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
Pajak Pertambahan Nilai	81,051,409,285	63,172,794,386
Pajak penghasilan:		
Pasal 21	-	20,387,782
Pasal 22	81,238,694	15,269,670

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak dibayar dimuka: (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (Lanjutan)

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Pasal 23	379,241,179	61,644
Pasal 25	231,769,222	-
Jumlah	81,743,658,380	63,208,513,482

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, jumlah pajak yang telah dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun "Pajak dibayar di muka" karena Kelompok Usaha masih belum memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan pada akhir periode pelaporan.

b. Utang pajak terdiri dari:

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
	Tidak diaudit	Diaudit
Perusahaan		
Pajak penghasilan (PPh):		
Pasal 4 (2)	3,640,000	114,900
Pasal 21	72,502,144	73,604,709
Pasal 22	23,922,002	24,351,598
Pasal 23	120,164,415	101,721,140
Pasal 25	836,447,108	3,680,367,274
Pasal 29		
Tahun 2021	9,797,041,540	-
Tahun 2020	34,106,504,322	34,106,504,322
Sub-jumlah	44,960,221,531	37,986,663,943

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
	Tidak diaudit	Diaudit
Entitas Anak		
Pajak Pertambahan Nilai	1,106,555,186	79,774,715
Pajak penghasilan (PPh):		
Pasal 4 (2)	102,419,561	91,279,686
Pasal 15	21,032,773	19,090,534
Pasal 21	107,584,029	76,333,981
Pasal 22	229,049,723	142,559,634
Pasal 23	711,409,564	522,330,684
Pasal 25	3,192,171,003	8,480,438,542

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Utang pajak terdiri dari: (Lanjutan)

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
	Tidak diaudit	Diaudit
Pasal 26	-	187,521
Pasal 29		
Tahun 2021	17,836,428,735	-
Tahun 2020	44,608,272,136	45,250,602,962
Sub-jumlah	67,914,922,710	54,662,598,259
Jumlah	112,875,144,241	92,649,262,202

c. Pengampunan Pajak

Nama perusahaan/ <i>Company's name</i>	Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak/ <i>Tax Amnesty Certificate Number</i>	Jumlah (Rp)/ <i>Amount (Rp)</i>	Uang tebusan/ <i>Redemption money</i>	Tanggal bayar/ <i>Payment date</i>
PT Interkraft	KET-1369/PP/WPJ.24/2017	12,861,855,000	385,855,650	28 Desember 2016/ <i>December 28, 2016</i>
PT Intertrend Utama	KET-906/PP/WPJ.24/2017	5,328,950,000	159,868,500	27 Desember 2016/ <i>December 27, 2016</i>
Perusahaan/ <i>the Company</i>	KET-11427/PP/WPJ.24/2017	4,092,000,000	204,600,000	26 Januari 2017/ <i>January 26, 2017</i>
				15 April 2017/ <i>April 15, 2017</i>
PT Belayan River Timber	KET-2152/PP/WPJ.14/2016	938,000,000	18,760,000	23 September 2016/ <i>September 23, 2016</i>
PT Narkata Rimba	KET-2156/PP/WPJ.14/2016	220,000,000	4,400,000	23 September 2016/ <i>September 23, 2016</i>
PT Integriya Dekorindo	KET-3738/PP/WPJ.24/2016	191,251,352	3,825,027	23 September 2016/ <i>September 23, 2016</i>
PT Intera Indonesia	KET-3120/PP/WPJ.24/2016	51,500,000	1,030,000	23 September 2016/ <i>September 23, 2016</i>
PT Inter Kayu Mandiri	KET-1186/PP/WPJ.24/2017	41,200,000	1,236,000	21 Desember 2016/ <i>December 21, 2016</i>

16. UANG MUKA PELANGGANAkun ini terdiri dari uang muka yang diterima dari pelanggan yang berasal dari penjualan *furnitures* dan *log*:

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Interkreasi Kerta Aji	-	-
<u>Pihak ketiga</u>		
Ekspor	651,022,646	13,343,229,485
Lokal	1,169,193,967	5,705,953,133
Jumlah	1,820,216,613	19,049,182,618

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

17. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

a. Modal Saham

Rincian pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

31 Maret 2021 (Tidak Diaudit)			
Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Integra Indo Lestari	4,532,469,620	71.87%	453,246,962,000
Masyarakat	1,773,780,380	28.13%	177,378,038,000
Jumlah/Total	6,306,250,000	100%	630,625,000,000

31 Desember 2020 (Diaudit)			
Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Integra Indo Lestari	4,532,469,620	71.87%	453,246,962,000
Komisaris			
Hendro Rusli	546,300	0.01%	54,630,000
Masyarakat	1,773,234,080	28.12%	177,323,408,000
Jumlah/Total	6,306,250,000	100%	630,625,000,000

b. Tambahan modal disetor

Rincian akun tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
Tambahan modal disetor		
di atas nilai nominal	207,837,562,853	207,837,562,853
Biaya emisi saham	(6,142,500,000)	(6,142,500,000)
Selisih transaksi kombinasi		
bisnis antar entitas		
sepengendali	21,249,342,229	21,249,342,229
Pengampunan pajak	1,047,708,333	1,047,708,333
Jumlah	223,992,113,415	223,992,113,415

Saldo tambahan modal disetor di atas nilai nominal berasal dari selisih antara hasil penerimaan dari Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2017 atas 1.250.000.000 lembar saham kepada masyarakat dengan nilai nominalnya dan MESOP.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

17. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)

c. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Pada tahun 2012, Perusahaan melakukan transaksi penyertaan saham pada BRT, ITR dan ITK, entitas anak. Pada tahun 2020, ITR, entitas anak, melakukan transaksi penyertaan saham pada SAM.

Transaksi tersebut di atas dilakukan antara entitas sepengendali dalam rangka kombinasi bisnis sehingga diperlakukan dengan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012) mengenai "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Selisih neto nilai transaksi kombinasi bisnis dengan entitas sepengendali yang dicatat sebagai "Tambahan modal disetor" sehubungan dengan transaksi penyertaan saham di entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

31 Maret 2021					
	Tahun akuisisi/ Year of acquisition	Harga jual/ Selling price	Aset bersih yang diperoleh/ Net assets Acquired	Selisih/ Difference	
Entitas anak					Subsidiaries
SAM	2020	6,750,000,000	3,953,644,773	(2,796,355,227)	SAM
BRT	2012	13,125,600,000	27,736,469,667	14,610,869,667	BRT
ITR	2012	7,524,000,000	9,096,469,925	1,572,469,925	ITR
ITK	2012	4,653,000,000	12,515,357,864	7,862,357,864	ITK
Jumlah		32,052,600,000	53,301,942,229	21,249,342,229	Total

31 Desember 2020					
	Tahun akuisisi/ Year of acquisition	Harga jual/ Selling price	Aset bersih yang diperoleh/ Net assets Acquired	Selisih/ Difference	
Entitas anak					Subsidiaries
SAM	2020	6,750,000,000	3,953,644,773	(2,796,355,227)	SAM
BRT	2012	13,125,600,000	27,736,469,667	14,610,869,667	BRT
ITR	2012	7,524,000,000	9,096,469,925	1,572,469,925	ITR
ITK	2012	4,653,000,000	12,515,357,864	7,862,357,864	ITK
Jumlah		32,052,600,000	53,301,942,229	21,249,342,229	Total

18. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Tabel berikut ini menjelaskan komponen dari hak pemegang saham non-pengendali entitas anak pada tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut:

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Desember 2020 (Diaudit)
PT Inter Kayu Mandiri	3,319,019,980	3,319,034,980
PT Interkraft	2,543,873,457	2,518,220,660
PT Intertrend Utama	1,779,443,429	1,748,574,948
PT Belayan River Timber	921,461,121	962,016,955
PT Intera Indonesia	544,447,712	510,865,069
PT Narkata Rimba	1,165,352,956	1,187,628,498
PT Integriya Dekorindo	103,991,532	114,354,539
Jumlah	10,377,590,187	10,360,695,649

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

19. PENJUALAN BERSIH

	31 Maret 2021	31 Maret 2020
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
Ekspor		
Manufaktur		
<i>Building</i>		
<i>component</i>	489,848,691,487	173,651,044,602
<i>Set up</i>	142,811,318,949	131,956,124,217
<i>Knock down</i>	253,887,746,874	95,965,260,820
Lokal		
Manufaktur		
<i>Building</i>		
<i>component</i>	6,872,004,889	6,974,374,509
<i>Set up</i>	2,445,979,730	12,396,621,539
<i>Knock down</i>	17,279,183	1,930,071,805
Kehutanan	7,819,222,690	47,118,322,021
Perdagangan	8,357,715,393	12,145,637,546
Jumlah	912,059,959,195	482,137,457,059

Rincian pelanggan yang memiliki transaksi penjualan lebih dari 10% dari jumlah penjualan bersih konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan bersih	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan bersih
Hampton Lumber Sales	269,506,390,323	29.55%	658,522,354,574	22.18%
Costco Wholesale Corporation	-	-	381,799,539,850	12.86%

20. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021	31 Maret 2020
	(Tidak diaudit)	(Tidak Diaudit)
<u>Manufaktur dan Kehutanan</u>		
Pemakaian bahan baku	441,915,862,951	207,342,273,134
Upah buruh langsung	103,890,623,093	75,667,835,775

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

20. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan)

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

	31 Maret 2021	31 Maret 2020
	(Tidak diaudit)	(Tidak Diaudit)
Beban pabrikasi	121,641,797,077	105,520,768,914
Jumlah beban produksi	667,448,283,121	388,530,877,823
Barang dalam proses		
Awal tahun	463,904,635,358	331,154,119,441
Akhir tahun	(521,267,024,003)	(359,644,388,470)
Jumlah beban pokok produksi	610,085,894,476	360,040,608,794
Persediaan barang jadi		
Awal tahun	363,838,656,990	-
Pembelian barang jadi	81,067,731,562	-
Akhir tahun	(447,921,397,683)	-
Sub-jumlah	607,070,885,345	360,040,608,794
Persediaan dalam perjalanan awal	497,279,430	244,929,868,823
Persediaan dalam perjalanan akhir	(1,863,038,498)	(298,860,256,680)
Sub-jumlah	605,705,126,277	306,110,220,937
<u>Perdagangan</u>		
Persediaan awal	46,797,712,229	36,692,486,147
Pembelian	3,849,005,859	16,903,833,499
Persediaan akhir	(45,353,641,981)	(46,378,519,601)
Sub-jumlah	5,293,076,108	7,217,800,045
Jumlah beban pokok penjualan	610,998,202,384	313,328,020,982

21. BEBAN PENJUALAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban penjualan dan umum dan administrasi adalah sebagai berikut

	31 Maret 2021	31 Maret 2020
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
<u>Beban penjualan</u>		
Kurir dan ekspor	49,552,124,068	6,182,001,485
Gaji dan tunjangan	1,368,838,712	2,588,623,400
Ongkos angkut	1,137,814,411	4,295,518,411
Penyusutan	1,720,195,151	1,432,784,315

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

21. BEBAN PENJUALAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan)

Rincian beban penjualan dan umum dan administrasi adalah sebagai berikut (Lanjutan)

	31 Maret 2021	31 Maret 2020
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
Perjalanan Dinas	110,894,955	-
Riset dan Pengembangan	150,164,552	-
Amortisasi	427,905,511	-
Sewa	-	948,892,492
Promosi	127,860,425	197,987,833
Komisi	12,405,945,786	4,334,989,547
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)	3,591,175,143	3,487,870,096
Jumlah	70,592,918,714	23,468,667,579
<u>Beban umum dan administrasi</u>		
Gaji dan tunjangan	19,210,775,307	16,561,577,283
Jasa manajemen	8,194,444,470	3,990,000,000
Pajak	947,205,528	886,026,893
Imbalan Kerja	3,600,169,619	3,182,800,006
Penyusutan	1,937,139,585	2,037,595,454
Asuransi	1,904,427,053	1,496,764,889
Jamuan dan sumbangan	508,314,627	354,077,389
Keperluan kantor	679,576,822	284,709,808
Sewa	76,072,444	1,539,201,711
Jasa profesional	1,354,337,170	733,833,020
Perbaikan dan pemeliharaan	591,942,670	177,328,217
Perjalanan dinas	99,152,974	321,504,056
Transportasi	507,224,501	654,713,553
Iuran dan perijinan	179,370,150	7,280,095
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 miliar)	1,786,429,059	1,647,517,442
Jumlah	41,576,581,979	33,874,929,816

22. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi usaha dan non usaha dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi-transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

22. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Sifat hubungan dan transaksi

Pihak-pihak berelasi	Hubungan	Jenis transaksi
PT Integra Indo Lestari (IIL)	Induk Perusahaan	Operasional
PT Interkreasi Kerta Aji (IKA)	Perusahaan Afiliasi	Operasional
PT Alam Mentari Sejahtera (AMS)	Perusahaan Afiliasi	Operasional
PT Buduran Indah Indonesia (BDI)	Perusahaan Afiliasi	Operasional

b. Transaksi

Penjualan bersih ke pihak berelasi (sebagai persentase terhadap jumlah penjualan bersih):

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Maret 2020 (Tidak diaudit)
Penjualan Bersih - AMS	-	829,025,520
Penjualan Bersih - IKA	815,506,900	1,256,253,182
Jumlah	815,506,900	2,085,278,702
Persentase terhadap		
Penjualan	0.09%	0.43%

Beban (sebagai persentase terhadap jumlah beban umum dan administrasi):

	31 Maret 2021 (Tidak diaudit)	31 Maret 2020 (Tidak diaudit)
Jasa manajemen IIL	8,194,444,470	3,990,000,000
Persentase terhadap		
beban umum dan		
administrasi	19.71%	11.78%

IIL memberikan jasa manajemen di bidang akuntansi, keuangan, pajak, sumber daya manusia dan dukungan jasa teknologi informasi kepada Perusahaan, ITR, ITK, NKT, BRT dan INT.

Saldo terutang pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 2.950.000.007 dan Rp 1.050.000.005 yang dicatat sebagai bagian dari "Utang lain-lain" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2021
dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

22. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

b. Transaksi (Lanjutan)

Beban (sebagai persentase terhadap jumlah beban bunga):

	31 Maret 2021	31 Maret 2020
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
Beban bunga - IIL	4,054,312,043	4,009,312,044
Persentase terhadap beban bunga	7.64%	7.99%

c. Saldo

Aset (sebagai persentase terhadap jumlah aset):

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Piutang usaha	-	2,300,558,312
Piutang lain-lain	1,804,375,073	1,537,999,457
Jumlah	1,804,375,073	3,838,557,769
Persentase terhadap aset	0.03%	0.06%

Liabilitas (sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas):

	31 Maret 2021	31 Desember 2020
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
Utang Usaha	-	6,061,310,841
Utang lain-lain		
Jangka pendek	1,050,000,005	2,950,000,007
Jangka panjang	143,852,000,000	149,615,000,000
Uang muka pelanggan	-	-
Jumlah	144,902,000,005	158,626,310,848
Persentase terhadap liabilitas	4.98%	5.43%

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT**

Tanggal 31 Maret 2021

dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

23. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021 (Tidak Diaudit)	31 Maret 2020 (Tidak Diaudit)
Laba tahun berjalan	101,847,895,311	57,131,986,670
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar	6,306,250,000	6,306,250,000
Laba per saham dasar dan dilusian	64.60	36.24

24. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	31 Maret 2021 (Tidak Diaudit)		31 Desember 2020 (Diaudit)	
	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah
ASET				
Kas dan setara kas	US\$ 565,898	8,246,263,907	US\$ 1,078,399	15,210,828,229
	RMB 6,864	15,234,826	RMB 6,938	14,995,445
Piutang usaha	US\$ 18,447,706	268,451,789,031	US\$ 24,039,731	339,080,408,883
Jumlah		276,713,287,764		354,306,232,557
LIABILITAS				
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	US\$ 6,636,160	96,702,123,520	US\$ 6,553,238	92,433,448,832
Utang usaha	US\$ 589,713	8,593,293,878	US\$ 840,821	11,859,787,437
	RMB 57,958	128,640,969	RMB 2,514,209	5,434,437,330
	EUR 17,065	734,547,179	EUR 2,434	42,183,952
Jumlah		106,158,605,546		109,769,857,551
Aset - bersih		170,554,682,218		244,536,375,006

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada periode 31 Maret 2021 dan Tahun 2020.

25. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pada tanggal 8 April 2021, perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan surat No. S-52/D.04/2021 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan 1 Integra Indocabinet Tahap 1 Tahun 2021" dan "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan 1 Integra Indocabinet Tahap 1 Tahun 2021". Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan terdiri dari 2 seri dengan jumlah pokok masing-masing Rp 42.180.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dan Rp 407.820.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun. Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan terdiri dari 2 seri dengan jumlah pokok masing-masing sebesar Rp 52.500.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun dan tingkat bunga ekuivalen sebesar 9% per tahun dan Rp 97.500.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan tingkat bunga ekuivalen sebesar 10,25% per tahun.

Perusahaan telah mencatatkan obligasi dan sukuk mudharabah ini di BEI pada tanggal 14 April 2021.

Pada tanggal 14 April 2021, ITK dan ITA, entitas anak, telah melunasi fasilitas kredit dari exim.